



**EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE) KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2018**

Ekki Gaddafi, S.Kom, M.Kom
Kabid. Layanan E- Government
DISKOMINFOTIK Provinsi Riau

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi No 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).



Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

1. Rintisan

- Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara *ad-hoc*.

2. Terkelola

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.

3. Terstandarisasi

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi.

4. Terintegrasi dan Terukur

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.

5. Optimum

- Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis

1. Informasi

- Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.

2. Interaksi

- Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.

3. Transaksi

- Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.

4. Kolaborasi

- Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.

5. Optimalisasi

- Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.



Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	17%
Aspek 1 - Kebijakan Tata Kelola SPBE	7%
Aspek 2 - Kebijakan Layanan SPBE	10%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	28%
Aspek 3 - Kelembagaan	8%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	8%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	12%
Domain 3 - Layanan SPBE	55%
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	33%
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	22%

Predikat Indeks SPBE		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *1
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang



A. KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA

- Kekuatan

Pemerintah Kabupaten Kampar sudah memiliki legalitas dan kejelasan konsep integrasi proses bisnis yang dituangkan kedalam master plan IT yang sudah disahkan, serta memiliki payung hukum yang terkait dengan integrasi aplikasi.

- Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kampar perlu untuk membuat kebijakan internal yang standar dan komprehensif untuk membentuk tim pengarah SPBE, anggaran dan belanja TIK, pengoprasian pusat data, integrasi sisten aplikasi serta penggunaan aplikasi umum berbagai pakai yang integral dan kolaboratif serta vertikal maupun horizontal.

Analisa : kelemahan ini terkait belum ada Regulasi (Perbup, juklak, juknis, SOP) terkait semua hal yang dimaksud dengan uraian kelemahan diatas.



B. KEBIJAKAN LAYANAN

- Kekuatan

Pemerintah Kabupaten Kampar sudah memiliki konsep kebijakan layanan manajemen perencanaan dan penganggaran. Legatitas layanan pengadaan dan juga penyelenggaraan e-payment juga sudah ada yang dituangkan kedalam surat keputusan Bupati Kampar.

- Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kampar perlu membuat kebijakan internal yang standar terkait dengan layanan naskah dinas, layanan manajemen kepegawaian, layanan manajemen perencanaan dan penganggaran, layanan manajemen keuangan, layanan manajemen kinerja, layanan pengaduan public, layanan JDIH, layanan whistle blowing system serta layanan publik instansi pemerintahan.

Analisa : kelemahan ini semua terkait dengan **Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis**



C. KELEMBAGAAN

- Kekuatan

Pemerintah Kabupaten Kampar sudah memiliki tim SPBE yang memiliki fungsi sebagai evaluator terhadap penyelenggaraan SPBE dilingkungan kabupaten Kampar.

- Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kampar perlu untuk memperbaiki legalitas tugas dan fungsi tim pengarah SPBE sehingga dapat bekerja secara optimal. Dokumen proses bisnis yang terstandarisasi juga perlu dibuat dan diterapkan pada seluruh unit kerja instansi pemerintah.

Analisa : Kelemahan ini semua terkait dengan **Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses**



D. STRATEGI DAN PERENCANAAN

- Kekuatan

Pemerintah Kabupaten Kampar sudah memiliki rencana induk SPBE sebagai acuan pengembangan IT dilingkungan kabupaten Kampar.

Anggaran dan belanja teknologi informasi dan komunikasi juga sudah ada sebagai wujud komitmen pemerintah untuk membangun prasarana IT.

- Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kampar perlu untuk mengembangkan rencana induk SPBE sehingga memiliki kelengkapan pada sisi muatan visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE dan peta jalan SPBE. Anggaran dan belanja TIK perlu untuk dikembangkan sehingga dapat dilaksanakan pada seluruh fungsi pemerintahan.

Analisa : kelemahan yang dimaksud Rancangan Induk SPBE kabupaten Kampar yang harus mengikut Perpres No. 95 tahun 2018 tentang SPBE serta Permen PAN RB No. 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Berbasis Pemerintahan Barbasis Elektronik (SPBE) ditambah dengan muatan lokal daerah.



E. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- Kekuatan

Pemerintah Kabupaten Kampar sudah memiliki kerjasama penyelenggaraan e-Government dengan pemerintah provinsi Riau sebagai jejaring yang kuat yang dapat membantu meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE dilingkungan kabupaten Kampar.

- Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kampar perlu untuk menggunakan satu atau beberapa pusat data yang dapat dimanfaatkan oleh semua unit kerja serta dapat dikendalikan oleh perangkat daerah dengan SOP yang lengkap. Integrasi sistem aplikasi dan penggunaan aplikasi umum juga perlu diterapkan secara keseluruhan serta sesuai dengan perencanaan yang ada.

Analisa : kelemahan ini dimaksud untuk dapat disegerakan realisasinya menjadi sasaran yang tertuang nantinya di Peraturan Kabupaten Kampar.



F. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

- Kekuatan

Pemerintah Kabupaten Kampar sudah memiliki layanan transaksi manajemen kepegawaian, perencanaan, keuangan dan pengadaan. Selain itu juga memiliki layanan manajemen penganggaran, kinerja yang interaktif sehingga membantu meningkatkan produktivitas para pegawai dipemerintahan.

- Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kampar perlu untuk memiliki layanan naskah dinas, serta perlu meningkatkan fitur semua aplikasi administrasi pemerintahan yang lain sampai dengan mampu berkolaborasi dengan sistem lain yang berbeda K/L/D.

Analisa : belum memiliki Administrasi Perkantoran Digital (surat menyurat, izin, cuti, SPT, SPJ, Agenda, absen)



G. PELAYANAN PUBLIK

- Kekuatan

Pemerintah Kabupaten Kampar memiliki layanan JDIH serta layanan informasi public yang interaktif sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas.

- Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kampar perlu memiliki layanan pengaduan public serta layanan Whistle Blowing system untuk fungsi control social baik internal maupun masyarakat umum.



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

